



DIALEKTIKA PUBLIK

| ISSN (Print) 2528-3332 | ISSN (Online) 2621-2218 |

Jurnal dapat diakses di <http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/dialektikapublik>



Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan Bintan Timur Oleh Dinas Sosial Kabupaten Bintan

Muhammad Hidayat Nasmi¹, Karjuni Dt. Maani²

¹Universitas Negeri Padang

²Universitas Negeri Padang

INFORMASI ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima Redaksi: 1 Februari 2019

Revisi Akhir: 15 Februari 2019

Diterbitkan Online: 28 Februari 2019

KATA KUNCI

Society empowerment, Joint business group (KUBE)

KORESPONDENSI

No HP: 08127555596

E-mail: mhn2895@gmail.com

A B S T R A C T

Society empowerment are effort to increase society dignity in the current society. Because so many society can not be free from poverty and backwardness. Social agency of Bintan regency has empowered poor families for helping families in improving social welfare which society empowerment are one of many solution for resolve poverty problem. But in reality still found many problem. The purpose of this research was analyze society empowerment of poor through joint business (Kube) in sub-district of east bintan by Social agency of Bintan regency. the method used is descriptive with a qualitative approach and using primary and secondary data. Data collection techniques used in this study were interviews, observation, and documentation. The results of the study indicate that the program has not been able to improve the people who are members of the KUBE program. This was apparent in several joint business groups (KUBE) who had difficulties in marketing, because they were not given easy access to the management of halal labels and permits from BPOM. So that society have difficulty entering their products more broadly, because it is a requirement of supermarkets and mini markets and bazaars made by the private sector

1. PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Karena dalam pelaksanaan sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum dan ideologi secara sistematis akan menciptakan dua kelompok masyarakat yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tuna berdaya. Proses pemberdayaan menekankan pada proses memberi kemampuan pada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya (Aprilia Theresia, dkk, 2014: 92-93).

Dengan adanya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin, hal ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap permasalahan sosial yang dihadapi oleh masyarakat keluarga fakir miskin di setiap daerah. Salah satu bentuk upaya

pemerintah yaitu dengan adanya program kelompok usaha bersama (KUBE). Kelompok usaha bersama merupakan kegiatan yang ditunjukan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, produktivitas kerja, kemampuan usaha ekonomi dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan.

Kelompok usaha bersama yang selanjutnya disingkat KUBE adalah himpunan dari keluarga fakir miskin yang dibentuk tumbuh dan berkembang atas dasar prakarsa sendiri, saling berinteraksi antara satu dengan yang lain dan tinggal dalam satu wilayah tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas anggotanya, meningkatkan relasi sosial yang harmonis, memenuhi kebutuhan anggotanya, memecahkan masalah sosial yang dialami dan menjadi wadah pengembangan usaha bersama. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dijabarkan dalam peraturan gubernur provinsi kepulauan Riau nomor 23 tahun 2010 tentang penyaluran dana bantuan keuangan kepada kabupaten/kota untuk pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di provinsi kepulauan Riau. Di dalam program tersebut terdapat sub program yaitu menumbuh

kembangkan kelompok usaha bersama (KUBE). Hal itu merupakan wujud kepedulian pemerintah provinsi kepulauan Riau dalam mengatasi masalah masyarakat penyanggah masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebagai wujud dari pemberdayaan masyarakat dicetuskan melalui Keputusan Menteri Sosial Nomor 84/HUK/1997 tentang "Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Keluarga Fakir Miskin". Program KUBE sebagai Program Kesejahteraan Sosial (PROKESOS) dalam upaya pemberdayaan masyarakat miskin melalui kelompok, mempunyai tujuan yaitu: *Pertama*, peningkatan kemampuan berusaha para anggota secara bersama dalam kelompok; *Kedua*, peningkatan pendapatan; *Ketiga*, pengembangan usaha; dan *Keempat*, peningkatan kepedulian dan kesetiakawanan sosial di antara para anggota dan dengan masyarakat sekitar. Tujuan akhir Program KUBE adalah menjadi embrio koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

Pelaksanaan program kelompok usaha bersama (KUBE) telah diatur melalui Peraturan Bupati Kabupaten Bintan Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Melalui Kelompok Usaha Bersama Kabupaten Bintan. Program KUBE diharapkan oleh pemerintah menjadi media untuk meningkatkan motivasi warga miskin agar lebih maju secara ekonomi dan sosial, meningkatkan interaksi dan kerjasama dalam kelompok, mendayagunakan potensi dan sumber sosial ekonomi lokal, memperkuat budaya kewirausahaan, mengembangkan akses pasar, dan menjalin kemitraan sosial ekonomi dengan 8 berbagai pihak terkait.

Namun dalam pemberdayaan masyarakat fakir miskin di Kecamatan Bintan Timur, Dinas sosial Kabupaten Bintan, masih ditemukan berbagai permasalahan seperti kurangnya motivasi masyarakat. Disisi lain masyarakat dalam pemberdayaan mendapatkan bantuan senilai Rp.20.000.000 per kube namun bantuan itu tidak langsung diberikn setelah kube itu terbentuk ada beberapa syarat yang harus di penuhi yaitu aktif, administrasi lengkap, dan terdaftar dari BDT dan harus berjalan beberapa tahun sebelum mendapat bantuan biasanya anggota kube mengumpulkan kas.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberdayaan masyarakat keluarga miskin melalui kelompok usaha bersama (KUBE), mengetahui kendala pemberdayaan masyarakat keluarga miskin melalui kelompok usaha bersama (KUBE) dan untuk mendeskripsikan upaya dalam mengatasi kendala pemberdayaan masyarakat keluarga miskin melalui kelompok usaha bersama (KUBE) di Kecamatan Bintan Timur oleh Dinas Sosial Kabupaten Bintan.

Dengan adanya fenomena-fenomena tersebut oleh karena itu peneliti tertarik melihat bagaimana pemberdayaan masyarakat keluarga fakir miskin melalui kelompok usaha bersama (KUBE) oleh Dinas Sosial Kabupaten Bintan pada tahun 2017, dengan judul **"Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Di Kecamatan Bintan Timur Oleh Dinas Sosial Kabupaten Bintan"**.

Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemberdayaan masyarakat keluarga miskin melalui kelompok usaha bersama (KUBE) di Kecamatan Bintan Timur oleh Dinas Sosial Kabupaten Bintan ?
2. Apa saja kendala pemberdayaan masyarakat keluarga miskin melalui kelompok usaha bersama (KUBE) di Kecamatan Bintan Timur oleh Dinas Sosial Kabupaten Bintan?
3. Apa saja upaya pemberdayaan masyarakat keluarga miskin melalui kelompok usaha bersama (KUBE) di Kecamatan Bintan Timur oleh Dinas Sosial Kabupaten Bintan?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Mendeskripsikan pemberdayaan masyarakat keluarga fakir miskin melalui kelompok usaha bersama (KUBE) di Kecamatan Bintan Timur.
2. Mengidentifikasi kendala pemberdayaan masyarakat keluarga fakir miskin melalui kelompok usaha bersama (KUBE) di Kecamatan Bintan Timur.
3. Mengidentifikasi upaya pemberdayaan masyarakat keluarga fakir miskin melalui kelompok usaha bersama (KUBE) di Kecamatan Bintan Timur.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pemberdayaan

Menurut Usman dalam Sungkowo Edy (2017:30) pemberdayaan adalah suatu proses pembelajaran masyarakat untuk mengembangkan seluruh potensi agar dapat berperan serta dalam pembangunan. Pemberdayaan bertujuan untuk menemukan alternatif-alternatif dalam pembangunan masyarakat. Dalam konteks ini, proses pemberdayaan dapat di pandang sebagai *depowerment* dari system kekuasaan yang mutlak-absolut (intelektual, religious, politik, ekonomi dan militer) konsep ini kemudian digantikan oleh landasan baru yang berlandaskan ide manusia dan kemanusiaan (humanism). Konsep ini memiliki doktrin yang sama dengan aliran fenomenologi, eksistensialisme dan personalisme yang menolak segala bentuk power yang bermuara hanya pada proses dehumanisme eksistensi manusia. Demikian juga aliran *Neo-Marxis*, freudianisme, sosiologi kritik

yang menolak industrialisasi, kapitalisme dan teknologi. Mereka beralasan bahwa ketiga hal tersebut dapat mematikan manusia dan kemanusiaan. Adapun cita-cita dari aliran ini adalah untuk menemukan sistem yang sepenuhnya berpihak kepada manusia dan kemanusiaan.

Menurut Hikmat dalam Sungkowo Edy (2017:33) menyatakan bahwa pemberdayaan menandung dua arti. Pengertian pertama adalah *to give power or authority* pengertian kedua *to give ability to or enable*. Pemaknaan pengertian pertama disuatu sisi meliputi memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasi otoritas kepada pihak yang kurang. Sedangkan pemaknaan yang kedua adalah memberikan peluang kepada pihak lain untuk melakukan suatu usaha.

Berbeda dengan pendapat tersebut Sumodiningrat dalam Sungkowo Edy (2017:40) menyampaikan, pemberdayaan sebenarnya merupakan khas Indonesia dari pada barat. Di barat istilah tersebut diterjemahkan sebagai *empowerment*, istilah itu tidak tepat. Pemberdayaan yang kita maksud adalah memberi “daya” bukanlah “kekuasaan”. Sedangkan menurut Parson dalam Haryono Suryono (2014:49) mengatakan bahwa pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Menurut Usman dalam Sungkowo Edy (2017:39), pemberdayaan adalah suatu proses pembelajaran masyarakat untuk mengembangkan seluruh potensi agar dapat berperan serta dalam pembangunan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemberdayaan masyarakat keluarga miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan Bintan Timur oleh Dinas Sosial Kabupaten Bintan?
2. Apa saja kendala pemberdayaan masyarakat keluarga fakir miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan Bintan Timur Oleh Dinas Sosial Kabupaten Bintan?

Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Menurut pendapat dari Suharto dalam Totok Markdikanto dan Poerwoko Soebianto (2017:170) terhadap strategi pemberdayaan masyarakat, ia mengemukakan adanya lima aspek penting yang dapat dilakukan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, khususnya melalui pelatihan dan advokasi terhadap masyarakat miskin, yaitu :

1. Motivasi

dalam hubungan ini setiap keluarga harus, setiap keluarga harus dapat memahami nilai kebersamaan, interaksi sosial dan kekuasaan melalui pemahaman akan haknya sebagai warga Negara dan anggota masyarakat

2. Peningkatan kesasaran dan pelatihan kemampuan

Peningkat dan kesadaran masyarakat dapat dicapai melalui pendidikan dasar, perbaikan kesehatan, imunisasi dan sanitasi.

3. Manajemen diri

Setiap kelompok masyarakat harus mampu memilih pemimpin mereka sendiri dan mengatur kegiatan mereka sendiri, seperti melaksanakan pertemuan-pertemuan, melakukan pencatatan dan pelaporan, mengoperasikan tabungan dan kredit, resolusi konflik dan manajemen kepemilikan masyarakat

4. Mobilisasi sumberdaya

Untuk mobilisasi sumberdaya masyarakat, diperlukan metode untuk menghimpun sumber-sumber individu melalui tabungan reguler dan sumbangan sukarela dengan tujuan penciptakan modal sosial.

5. Pembangunan dan pengembangan jejaring
Pengorganisasian kelompok-kelompok swadaya masyarakat perlu disertai dengan peningkatan kemampuan para anggotanya membangun dan mempertahankan jaringan dengan berbagai system sosial dan sekitarnya.

Kemiskinan

Pengertian kemiskinan

Kemiskinan merupakan fenomena yang masih sulit dipecahkan oleh bangsa Indonesia. Kemiskinan juga memunculkan berbagai masalah seperti kebodohan, pengangguran, kelaparan, kesenjangan sosial, kesehatan. Pada dasarnya kemiskinan adalah masalah yang dihadapi oleh semua Negara di dunia, tidak terkecuali Negara maju seperti Amerika Serikat.

Menurut Todaro dalam Sungkowo Edy (2017:5) menyatakan absolute (*absolute poverty*) mengacu kepada semua penduduk yang hidup dibawah “garis kemiskinan internasional” atau yang kurang dari pendapatan minimum tertentu. Sedangkan istilah miskin menurut Thoir dalam Sungkowo Edy (2017:6) adalah kondisi yang secara umum menggambarkan suatu rumah tangga, komunitas, atau seseorang yang berda dalam kekurangan, terutama kaitannya dengan pemenuhan yang paling dasar.

Sedangkan menurut pendapat Ambar dalam Sungkowo Edy (2017:6) kemiskinan itu sendiri ditandai oleh kondisi masyarakat yang serba terbatas, baik dalam aksesibilitas pada faktor produksi, peluang atau kesempatan berusaha, pendidikan, serta fasilitas hidup lainnya sehingga dalam setiap aktivitas maupun usaha menjadi sangat terbatas.

Ukuran Kemiskinan

Menurut Ravallion dalam Sungkowo Edy (2017:9) ukuran kemiskinan dipertimbangkan berdasarkan pada norma-norma tertentu. Pilihan norma tersebut sangat penting terutama

dalam hal pengukuran kemiskinan yang didasarkan konsumsi. Garis kemiskinan yang didasarkan konsumsi terdiri dari dua elemen, yaitu (1) pengeluaran untuk membeli standar gizi minimum dan kebutuhan mendasar lainnya (2) jumlah kebutuhan yang sangat bervariasi, yang mencerminkan biaya partisipasi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Di Indonesia, Badan Pusat Statistik (2008) biasanya mengeluarkan garis kemiskinan yang disesuaikan dengan wilayah perdesaan dan perkotaan serta kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Studi penentuan kriteria penduduk miskin (SPKPM), untuk mengetahui karakteristik rumah tangga yang mampu mencirikan kemiskinan secara konseptual. Informasi ini berguna untuk penentuan sasaran rumah tangga program pengentasan kemiskinan. Dari hasil SPKPM 2000, diperoleh enam variabel yang dianggap layak dan operasional untuk penentuan rumah tangga miskin di lapangan. Skor 1 mengacu pada sifat-sifat yang mencirikan kemiskinan dan skor 0 mencirikan ketidakmiskinan.

Tabel 1.3 Indikator Rumah Tangga Miskin

1. luas lantai perkapita	4. kepemilikan aset
<ul style="list-style-type: none"> < 8 m (skor 1) > 8 m (skor 0) 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak punya aset (skor 1) Punya aset (skor 0)
2. jenis lantai	5. Pendapatan (total pendapatan perbulan)
<ul style="list-style-type: none"> Tanah (skor 1) Bukan tanah (skor 0) 	<ul style="list-style-type: none"> < 350.000 (skor 1) > 350.000 (skor 0)
3. Air minum/ketersediaan air bersih	6. Pengeluaran (prosentasi pengeluaran untuk makan)
<ul style="list-style-type: none"> Air hujan/sumur tidak terlindungi (skor 1) PAM, sumur terlindungi (skor 0) 	<ul style="list-style-type: none"> 80 persen + (skor 1) < 80 persen (skor 0)

Kendala Internal

Kendala Internal (*Internal constraint*) yaitu Kendala Internal (*Internal constraint*) adalah faktor-faktor yang membatasi perusahaan ataupun organisasi dan sistem yang berasal dari dalam perusahaan ataupun organisasi.

Dalam setiap program tentunya terdapat kendala-kendala yang dialami oleh setiap unsur yang terlibat dalam program tersebut. Begitupun dengan Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kabupaten Bintan. Dari data yang peneliti temui di lapangan diketahui terdapat beberapa kendala yang dialami secara internal, baik oleh Instansi terkait yaitu Dinas Sosial Kabupaten Bintan, maupun masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Secara Internal Dinas Sosial Kabupaten Bintan mengalami kendala yang menjadi hambatan dalam menyelesaikan program KUBE tersebut, kendala yang dialami adalah kurangnya Sumber Daya Manusia yang tersedia di Dinas Sosial Kabupaten Bintan. Dimana SDM yang tersedia tidak mencukupi untuk mampu mengkoordinir Kelompok-kelompok yang sudah terbentuk secara maksimal, sehingga timbul keluhan dari beberapa KUBE yang merasa tidak diperhatikan, walaupun Dinas Sosial kabupaten Bintan sudah berupaya semaksimal mungkin, tetap saja kekurangan jumlah SDM yang tersedia menjadi hambatan dalam komunikasi dengan Kelompok-kelompok yang sudah terbentuk.

Selain Dinas Sosial Kabupaten Bintan, masyarakat yang merupakan subjek penting dalam Pemberdayaan ini juga memiliki kendala-kendala secara internal. Hal itu terlihat dari pengakuan beberapa KUBE yang mengatakan bahwa cukup sulit mereka dalam menyesuaikan waktu satu sama lain. Beracuan pada prinsip pemberdayaan yang dijelaskan Mardikanto dalam Nunung Nurwati (2008:6) salah satu dari prinsip tersebut adalah harus adanya prinsip kedisiplinan, keseriusan, serta profesional di kalangan yang terlibat. Jika melihat temuan peneliti di lapangan, lalu dihubungkan dengan prinsip pemberdayaan yang disampaikan Mardikanto jelas terdapat prinsip penting dalam Pemberdayaan yang masih menjadi pertanyaan dalam penerapan program Pemberdayaan masyarakat kabupaten Bintan melalui program KUBE.

Kedisiplinan, keseriusan, serta profesional merupakan prinsip yang seharusnya dipegang oleh semua unsur yang terlibat. Baik itu Dinas Sosial Kabupaten Bintan, apalagi masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tersebut. Untuk mewujudkan profesionalitas dari Dinas Sosial tentunya penambahan Sumber Daya Manusia menjadi keharusan agar upaya menyelesaikan program ini tidak menjadi sia-sia. Dalam keberlangsungan Pemberdayaan ini, Pemerintah melalui Dinas Sosial juga harus mampu memperhatikan keseriusan, kedisiplinan, serta profesionalitas dari setiap anggota KUBE yang tergabung. Sejauh ini kendala yang dialami cukup mempengaruhi pemberdayaan itu sendiri.

Kendala Eksternal

Kendala Eksternal (*Eksternal constraint*) adalah faktor-faktor yang membatasi perusahaan atau organisasi yang berasal dari luar. Atau dapat diartikan berasal dari luar organisasi ataupun sebuah sistem. Dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kabupaten Bintan terdapat kendala eksternal yang menghambat berjalannya pemberdayaan tersebut.

Kendala eksternal utama yang dialami adalah masyarakat yang tergabung dalam KUBE tersebut kesulitan dalam pemasaran produk hasil usaha mereka. Karena sebagian besar KUBE bergerak dalam usaha makanan atau kuliner, sehingga untuk memasukkan produk ke supermarket harus terlebih dahulu memenuhi syarat dari BPOM serta mendapatkan label halal. Dinas Sosial sudah berupaya berkoordinasi dengan Dinas lain yang terkait, namun belum terdapat perkembangan yang berarti untuk kendala tersebut.

Kesulitan yang dialami oleh masyarakat untuk mendapat label halal serta mendapat izin BPOM membuat pemasaran yang dilakukan hanya kepada warung-warung kecil yang terdapat di kabupaten Bintan. Hal itu mengakibatkan proses pemasaran produk usaha mereka tidak berjalan dengan begitu baik serta kurang maksimal. Pemasaran menjadi hal yang sangat penting dalam dunia usaha, maka dari itu kendala ini menjadi hambatan yang sangat berarti untuk masyarakat yang tergabung dalam program tersebut.

3. METODOLOGI

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian dilakukan di Kecamatan Bintan Timur, yaitu di Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Penggunaan sistem *Purposive Sampling* dalam penelitian ini agar peneliti mendapatkan data yang valid dan maksimal. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung dari informan. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap literatur yang dapat menunjang penelitian. Untuk mendapatkan data yang kredibilitas tinggi maka dalam penelitian ini digunakan bentuk pemeriksaan keabsahan data yang sesuai dengan pendapat Moleong (2005:329-331), yaitu teknik triangulasi sumber yang dilakukan dengan cara melakukan *member check* sampai dicapai tahap kejenuhan data. Proses analisis data dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan terakhir penarikan kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Di Kecamatan Bintan Timur Oleh Dinas Sosial Kabupaten Bintan

Menurut Usman dalam Sungkowo Edy (2017:30) pemberdayaan adalah suatu proses pembelajaran masyarakat untuk mengembangkan seluruh potensi agar dapat berperan serta dalam pembangunan. Pemberdayaan bertujuan untuk menemukan alternatif-alternatif dalam pembangunan masyarakat. Menurut Hikmat dalam Sungkowo Edy (2017:33) menyatakan bahwa pemberdayaan mengandung dua arti. Pengertian pertama adalah *to*

give power or authority. Pengertian kedua *to give ability to or enable*. Pemaknaan pengertian pertama disuatu sisi meliputi memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasi otoritas kepada pihak yang kurang. Sedangkan pemaknaan yang kedua adalah memberikan peluang kepada pihak lain untuk melakukan suatu usaha.

Analisa Pemberdayaan masyarakat fakir miskin melalui kelompok usaha bersama (KUBE) di Kecamatan Bintan Timur oleh Dinas Sosial Kabupaten Bintan dapat dilihat dengan beberapa indikator yaitu, (a) Motivasi, (b) Pelatihan, dan (c) Modal.

Motivasi

Dalam hubungan ini, setiap keluarga harus dapat memahami nilai kebersamaan, interaksi sosial dan kekuasaan melalui pemahaman akan haknya sebagai warga Negara dan anggota masyarakat. Karena itu, setiap rumah tangga perlu didorong untuk membentuk kelompok yang merupakan mekanisme kelembagaan penting untuk mengorganisir dan melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat di desa atau kelurahannya. Kelompok ini kemudian dimotivasi untuk terlibat dalam kegiatan peningkatan pendapatan dengan menggunakan sumber-sumber dan kemampuan-kemampuan mereka sendiri.

Dalam Pemberdayaan masyarakat fakir miskin melalui kelompok usaha bersama (KUBE) di Kecamatan Bintan Timur oleh Dinas Sosial Kabupaten Bintan sudah melakukan motivasi dengan baik, sehingga masyarakat dalam hal ini yang akan menjadi bagian terpenting dalam menyukseskan program KUBE tersebut sangat terdorong untuk bangkit dan berani membentuk kelompok usaha yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Pemerintah. Keban dalam Sungkowo Edy (2017:27) menjelaskan tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak, dan mengandalkan apa yang mereka lakukan tersebut. Beracuan pada tujuan Pemberdayaan yang dijelaskan oleh Keban, sangat jelas dapat dipahami bahwa tujuan utama dari pemberdayaan adalah melahirkan kemandirian dari masyarakat. Agar kemandirian tersebut bisa dicapai, maka Pemerintah memiliki peran penting dalam mewujudkannya. Lahirnya program KUBE ini merupakan langkah tepat yang dilakukan Pemerintah untuk menjalankan tanggungjawabnya dalam mewujudkan kemandirian pada masyarakat fakir miskin.

Untuk mewujudkan Kemandirian yang merupakan tujuan dari Pemberdayaan, Dinas Sosial Kabupaten Bintan yang merupakan lembaga bertanggungjawab terhadap berjalannya pemberdayaan masyarakat fakir miskin di Kabupaten Bintan melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) ini sudah melakukan Pemberdayaan yang dimulai dengan pemberian

motivasi kepada masyarakat fakir miskin yang akan menjadi bagian dari terselenggaranya program ini. Motivasi kepada masyarakat dilakukan dengan mendatangkan Motivator dari Pusat yang mempunyai kemampuan motivasi yang baik untuk mendorong masyarakat menjadi berani melakukan usaha dan siap keluar dari keterpurukan.

Motivasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bintan merupakan langkah awal dalam menggerakkan masyarakat untuk berani melakukan usaha dengan bantuan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bintan sejauh ini dinilai oleh masyarakat yang sudah menjadi bagian dari program tersebut sudah terlaksana dengan baik dan sangat membantu untuk masyarakat berani memulai membentuk usaha dalam bentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Pelatihan

Peningkat dan kesadaran masyarakat dapat dicapai melalui pendidikan dasar, perbaikan kesehatan, imunisasi dan sanitasi. Sedangkan keterampilan-keterampilan vokasional bisa dikembangkan melalui cara-cara partisipatif. Pengetahuan local yang biasanya diperoleh melalui pengalaman dapat dikombinasikan dengan pengetahuan dari luar. Pelatihan semacam ini dapat membantu masyarakat miskin untuk menciptakan mata pencaharian sendiri atau membantu meningkatkan keahlian mereka untuk mencari pekerjaan di luar wilayahnya.

Pelatihan menjadi bagian yang sangat penting dalam memberikan pengetahuan dan membentuk keterampilan bagi setiap masyarakat yang akan menjadi bagian dari program Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Pelatihan yang diberikan kepada masyarakat sangat membantu untuk membentuk keterampilan bagi masyarakat, agar pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bintan sesuai dengan rencana dan tujuan dari program tersebut.

Mulyono dalam Sungkowo Edy (2017:12) menjelaskan karakteristik orang miskin, salah satunya adalah seseorang yang memiliki kemauan, tetapi tidak memiliki kemampuan, seseorang ini memiliki kemauan untuk melakukan kegiatan dalam menunjang kehidupan, tetapi tidak memiliki kemampuan atau keterampilan oleh pasar baik di bidang industry maupun di bidang usaha. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Mulyono tersebut sesuai dengan kondisi masyarakat setelah diberikan motivasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Bintan. Dimana masyarakat telah diberikan dorongan yang melahirkan keinginan dan kemauan melakukan usaha. Kemauan yang besar dari masyarakat tersebut perlu disertai dengan kemampuan dan keterampilan melakukan usaha.

Dinas Sosial Kabupaten Bintan dalam menyukseskan Program Pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) telah mampu melahirkan kemauan dalam diri masyarakat fakir miskin untuk menjalankan usaha. Setelah melakukan motivasi untuk mendorong masyarakat Dinas Sosial Kabupaten Bintan selanjutnya melakukan Pelatihan untuk memberikan pemahaman dan memberikan keterampilan kepada masyarakat. Pelatihan tersebut dilakukan berdasarkan kebutuhan dari KUBE yang telah dibentuk oleh masing-masing masyarakat, baik itu pelatihan KUBE yang ingin bergerak dalam kerajinan tangan, kuliner, dan sebagainya. Pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bintan dalam pelaksanaan Pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama tersebut sejauh ini belum mampu memberikan keterampilan secara menyeluruh kepada seluruh anggota Kelompok Usaha Bersama yang tergabung. Masih terdapat anggota KUBE yang tidak begitu mahir dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota dari kelompok usaha. Selain itu, Pelatihan yang dilakukan tidak menyentuh secara spesifik untuk pemasaran produk yang dihasilkan. Hal itu dirasakan oleh beberapa KUBE yang peneliti temui di lapangan.

Pelatihan yang hanya melibatkan Ketua dan sekretaris KUBE yang berarti Ketua dan sekretaris itulah yang bertanggungjawab untuk memberikan pemahaman kepada anggota mereka masing-masing. Hal itu dinilai menjadi salah satu faktor tidak semua anggota KUBE mahir dalam menjalankan tugas mereka di dalam kelompok tersebut. Titik lemah dalam pelaksanaan pemberdayaan tersebut harus dilakukan perbaikan oleh Dinas Sosial agar upaya mewujudkan kemandirian terhadap masyarakat fakir miskin dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

Modal

Untuk mobilisasi sumberdaya masyarakat, diperlukan metode untuk menghimpun sumber-sumber individu melalui tabungan regular dan sumbangan sukarela dengan tujuan penciptaan modal sosial. Ide ini didasari pandangan bahwa setiap orang memiliki sumbernya sendiri yang jika dihimpun, dapat meningkatkan kehidupan social ekonomi secara substansial.

Dalam melakukan usaha di bidang apapun, Modal menjadi bagian sangat penting agar usaha tersebut bisa berjalan dengan baik. Modal yang diterima oleh Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kabupaten Bintan didapatkan dari Pemerintah setelah Basis Data Terpadu (BDT) yang menjadi syarat agar kelompok tersebut mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah. Setelah terdaftar di BDT yang merupakan data terpusat di Kementerian Sosial, Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial akan melakukan Motivasi dan pelatihan terhadap KUBE yang sudah terdaftar. Setelah melewati tahapan tersebut, maka KUBE yang terdaftar akan diberikan bantuan modal usaha oleh Pemerintah. Modal dari

Pemerintah inilah yang menjadi penggerak bagi masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama. Melalui modal yang diberikan Pemerintah yang diolah oleh masyarakat dalam bentuk usaha bersama.

1. Kendala Dalam Pemberdayaan Masyarakat Keluarga Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan Bintan Timur oleh Dinas Sosial Kabupaten Bintan

Dalam Pemberdayaan Masyarakat Keluarga Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan Bintan Timur oleh Dinas Sosial Kabupaten Bintan, terdapat berbagai macam kendala yang dihadapi baik oleh Dinas Sosial Kabupaten Bintan sebagai Instansi yang bertanggung jawab, maupun masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Sebagaimana yang diungkapkan oleh Hansen dan Mowen dalam Selviana dan Setya (Jurnal vol 4, no 2, 2016) mengelompokkan jenis kendala berdasarkan asalnya, yaitu Kendala Internal (*Internal constraint*) dan Kendala Eksternal (*Eksternal constraint*).

Kendala Internal

Kendala Internal (*Internal constraint*) yaitu Kendala Internal (*Internal constraint*) adalah faktor-faktor yang membatasi perusahaan ataupun organisasi dan sistem yang berasal dari dalam perusahaan ataupun organisasi. Dalam setiap program tentunya terdapat kendala-kendala yang dialami oleh setiap unsur yang terlibat dalam program tersebut. Begitupun dengan Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kabupaten Bintan. Dari data yang peneliti temui di lapangan diketahui terdapat beberapa kendala yang dialami secara internal, baik oleh Instansi terkait yaitu Dinas Sosial Kabupaten Bintan, maupun masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Secara Internal Dinas Sosial Kabupaten Bintan mengalami kendala yang menjadi hambatan dalam menyelesaikan program KUBE tersebut, kendala yang dialami adalah kurangnya Sumber Daya Manusia yang tersedia di Dinas Sosial Kabupaten Bintan. Dimana SDM yang tersedia tidak mencukupi untuk mampu mengkoordinir Kelompok-kelompok yang sudah terbentuk secara maksimal, sehingga timbul keluhan dari beberapa KUBE yang merasa tidak diperhatikan, walaupun Dinas Sosial kabupaten Bintan sudah berupaya semaksimal mungkin, tetap saja kekurangan jumlah SDM yang tersedia menjadi hambatan dalam komunikasi dengan Kelompok-kelompok yang sudah terbentuk. Selain Dinas Sosial Kabupaten Bintan, masyarakat yang merupakan subjek penting dalam Pemberdayaan ini juga memiliki kendala-kendala secara internal. Hal itu terlihat dari pengakuan beberapa KUBE yang mengatakan bahwa cukup sulit mereka dalam menyesuaikan waktu satu sama lain. Beracuan pada prinsip pemberdayaan yang

dijelaskan Mardikanto dalam Nunung Nurwati (2008:6) salah satu dari prinsip tersebut adalah harus adanya prinsip kedisiplinan, keseriusan, serta profesional di kalangan yang terlibat. Jika melihat temuan peneliti di lapangan, lalu dihubungkan dengan prinsip pemberdayaan yang disampaikan Mardikanto jelas terdapat prinsip penting dalam Pemberdayaan yang masih menjadi pertanyaan dalam penerapan program Pemberdayaan masyarakat kabupaten Bintan melalui program KUBE.

Kedisiplinan, keseriusan, serta profesional merupakan prinsip yang seharusnya dipegang oleh semua unsur yang terlibat. Baik itu Dinas Sosial Kabupaten Bintan, apalagi masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tersebut. Untuk mewujudkan profesionalitas dari Dinas Sosial tentunya penambahan Sumber Daya Manusia menjadi keharusan agar upaya menyelesaikan program ini tidak menjadi sia-sia. Dalam keberlangsungan Pemberdayaan ini, Pemerintah melalui Dinas Sosial juga harus mampu memperhatikan keseriusan, kedisiplinan, serta profesionalitas dari setiap anggota KUBE yang tergabung. Sejauh ini kendala yang dialami cukup mempengaruhi pemberdayaan itu sendiri.

Kendala Eksternal

Kendala Eksternal (*Eksternal constraint*) adalah faktor-faktor yang membatasi perusahaan atau organisasi yang berasal dari luar. Atau dapat diartikan berasal dari luar organisasi ataupun sebuah sistem. Dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kabupaten Bintan terdapat kendala eksternal yang menghambat berjalannya pemberdayaan tersebut.

Kendala eksternal utama yang dialami adalah masyarakat yang tergabung dalam KUBE tersebut kesulitan dalam pemasaran produk hasil usaha mereka. Karena sebagian besar KUBE bergerak dalam usaha makanan atau kuliner, sehingga untuk memasukkan produk ke supermarket harus terlebih dahulu memenuhi syarat dari BPOM serta mendapatkan label halal. Dinas Sosial sudah berupaya berkoordinasi dengan Dinas lain yang terkait, namun belum terdapat perkembangan yang berarti untuk kendala tersebut.

Kesulitan yang dialami oleh masyarakat untuk mendapat label halal serta mendapat izin BPOM membuat pemasaran yang dilakukan hanya kepada warung-warung kecil yang terdapat di kabupaten Bintan. Hal itu mengakibatkan proses pemasaran produk usaha mereka tidak berjalan dengan begitu baik serta kurang maksimal. Pemasaran menjadi hal yang sangat penting dalam dunia usaha, maka dari itu kendala ini menjadi hambatan yang sangat berarti untuk masyarakat yang tergabung dalam program tersebut.

5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diungkapkan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Program Pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) diberikan kepada masyarakat kurang mampu di Kabupaten Bintan. Bantuan tersebut diberikan dalam bentuk modal usaha, melatih keterampilan masyarakat dengan tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Bintan. Walaupun pelaksanaan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang dijalankan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bintan telah berjalan sesuai prosedur, terutama di Kecamatan Bintan Timur. Namun, program tersebut belum mampu meningkatkan kesejahteraan anggota yang tergabung dalam program KUBE. Hal ini tampak pada beberapa Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang kesulitan dalam pemasaran, dikarenakan tidak diberikannya akses kemudahan dalam pengurusan label halal dan izin dari BPOM, sehingga masyarakat kesulitan memasukan produknya lebih luas, karena itu merupakan persyaratan dari Supermarket dan mini market dan bazar yang dibuat oleh swasta. Hal itu berakibat pada pemasaran produk usaha KUBE yang sebagian besar adalah makanan menjadi kesulitan dalam menjalankan usaha.

2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program kelompok usaha bersama (KUBE) di Kabupaten Bintan Kecamatan Bintan Timur dapat dikategorikan dalam dua bentuk yaitu Kendala internal dan eksternal. Kendala internal adalah (1) kurangnya Sumber Daya Manusia di Dinas Sosial Kabupaten Bintan, sehingga menyulitkan dalam koordinasi dengan masyarakat yang tergabung dalam kelompok Usaha Bersama (KUBE). Serta kendala internal yang dialami oleh Kelompok usaha yang tergabung dalam program ini, yaitu kendala mencari waktu luang antara anggota kube, dan tidak semua anggota kube mahir dalam menjalankan tugasnya, (2) Kendala Eksternal datang dari kurang baiknya koordinasi antara Dinas Sosial Kabupaten Bintan dengan beberapa Dinas lainnya, yang berakibat pada sulitnya mendapatkan label halal dan perizinan dari BPOM untuk pemasaran produk-produk hasil usaha KUBE ke Supermarket dan Minimarket yang ada.

3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala oleh Dinas Sosial Kabupaten Bintan adalah dengan berkoordinasi dengan Dinas yang memiliki program Bazar untuk memudahkan masyarakat yang tergabung dalam program KUBE ikut serta dalam Bazar tersebut. Serta Upaya lain yang dilakukan oleh KUBE itu sendiri adalah dengan melakukan inovasi pemasaran melalui media sosial (Online), serta bekerja sama dengan warung-warung kecil.

Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebianto. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta

Mulyono, Sungkono Edy. (2017). *Kemiskinan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Ombak

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Selviana Putri Larasati, Setya Haksama. 2016. *Penerapan Theory Of Constraint Pada Kepuasan Kerja Karyawan Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya*. Jurnal 4 No. 2.

DAFTAR PUSTAKA

Lexy J. Moeloeng. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya